



REVIU KE-II RENCANA KINERJA TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
#melayani
#bangsa**



<https://pt-jakarta.go.id/>



@pengadilantinggi_dki_jakarta



info.ptdkjakarta@mail.com





PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KE-II PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini.



Jakarta, 01 Desember 2022

Penanggung Jawab


Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.

Nip. 19560405 198203 1 005

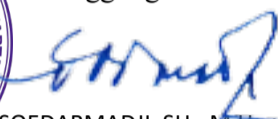
REVIU SHEET KE-II
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Reviu Ke-II Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di reviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

| NO. | KOREKSI/SARAN/MASUKAN | HALAMAN |
|-----|---|----------|
| 1 | Perubahan Indikator pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 | Lampiran |
| 2 | Perubahan Target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 | Lampiran |
| 3 | Penambahan Tujuan dan Sasaran | Lampiran |
| 4 | Penambahan Strategi, Program, Kegiatan dan Anggaran | Lampiran |



Jakarta, 01 Desember 2022
Penanggung Jawab


Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
Nip. 19560405 198203 1 005

REVIU KE-II RENCANA KINERJA TAHUN 2022
W10-U/ 6702 /OT.01.1/12/2022
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

| NO | TUJUAN | | SASARAN STRATEGIS | | TARGET | STRATEGI | | | | | | |
|----|---|--|--|---|-------------------|----------------------------|---|--|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | PROGRAM | KEGIATAN | AKSI | ANGGARAN (Rp) | | | |
| 1 | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yangn pasti, transparan dan akuntabel | % perkara yang diselesaikan tepat waktu | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | 95% | Program dukungan manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 1. Melaksanakan persidangan dan minutasi perkara masuk untuk perdata, pidana dan tipikor 2. Melaksanakan dan minutasi perkara perdata, pidana dan tipikor 3. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat | Rp. 48.176.428.000,- | | | |
| 2 | | | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 95% | | | | | | | |
| 3 | | | | Persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan tepat waktu | 95% | | | | | | | |
| 4 | | | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 56% | | | | | | | |
| 5 | | Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan | 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. 720.000.000,- | | | | | | | |
| 6 | | % salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | 75% | | Program penegakan dan pelayanan hukum | | | Peningkatan manajemen peradilan umu | Melaksanakan Pemantauan pengiriman salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju | Rp. 620.350.000,- |
| 7 | | % salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | 92% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|
| 8 | | % salinan putusan tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | | Persentase salinan putusan tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | 95% | | | | |
| 9 | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung | | Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan teknis dan administrasi tingkat banding | Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | 100% | Program dukungan manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 1. Melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan waktu yang ditentukan 2. Menyelesaikan laporan hasil pengawasan langsung pada hari penagwasan | Rp. 48.176.428.000,- |
| | | | | | | Program penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan manajemen peradilan umum | | Rp. 620.350.000,- |
| | | Peningkatan kualitas SDM | Jumlah tenaga teknis dan administrasi yang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) | 70 | Program dukungan manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 1. Melaksanakan kegiatan Bimtek | Rp. 48.176.428.000,- | |
| | | | | | Program penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan manajemen peradilan umum | | Rp. 620.350.000,- | |

Jakarta, 01 Desember 2022

Ketua,



Dr. SOEDARMADJI, SH., M.HUM.

NP. 19560405 198203 1 005



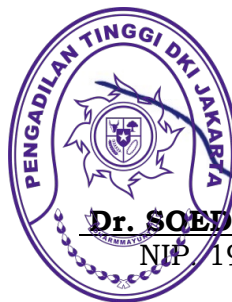
LAMPIRAN

REVIU KE-I RENCANA KINERJA TAHUN 2022
W10-U/ /OT.01.1/9/2022
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | | TARGET |
|-----|---|-----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor | 95% 95% 95% |
| | | b. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 33% |
| | | c. | Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan | 3 |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor | 95% 95% 95% |

Jakarta, 01 September 2022

Ketua,



Dr. SOEDARMADJI, SH., M.HUM.

NIP. 19560405 198203 1 005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10.U/232/KP.01.1/12/2022**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU KE II IKU TAHUN 2022, RENSTRA TAHUN 2020-2024,
PKT, RKT DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI
DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Reviu serta adanya perubahan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka perlu penetapan Reviu ke II IKU Tahun 2022, Renstra Tahun 2020-2024, PKT, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - 5. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan.

MEMUTUSKAN

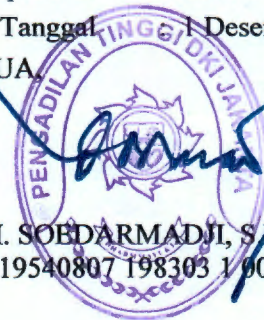
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU KE II IKU TAHUN 2022, RENSTRA TAHUN 2020-2024, PKT, RKT DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**
- Kesatu** : Menetapkan Reviu ke II IKU Tahun 2022, Renstra Tahun 2020-2024, PKT, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Desember 2022

KETUA


Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 19540807 198303 1 003





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/139 /KP.01.1/7/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka perlu untuk dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022 maka perlu untuk dibentuk Tim;
- c. bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1703/SEK/OT.01.2/7/2022 tentang Penginputan/Update Data Capaian Kinerja pada Aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**
- Kesatu** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menetapkan RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama IKU, RENSTRA, PKT dan RKT bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu – isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Juli 2022

DI. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum
NIP. 195604051982031005

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 Nomor : W10-U/134/KP.01.1/7/2022
 Tanggal : 28 Juli 2022
 Tentang :

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022
 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN |
|----|---|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum. NIP. 195604051982031005 | Ketua | Pembina |
| 2 | Heru Pramono, S.H., M.Hum NIP. 196111191985121001 | Wakil Ketua | Ketua Tim |
| 3 | Bukaeri, SH., MM NIP. 19621006 198303 1 005 | Panitera | Wakil Ketua Tim |
| 4 | Sudiyanto, S.H., M.H. NIP. 19691130 199203 1 001 | Sekretaris | Sekretaris Tim |
| 5 | Tony Pribadi, S.H., M.H. NIP. 19570725 198612 1 001 | Hakim Tinggi | Koordinator |
| 6 | H. Edwarman, S.H. NIP. 19560815 198303 1 005 | Hakim Tinggi | Anggota |
| 7 | H. Mulyanto, S.H., M.H. NIP. 19570502 198403 1 001 | Hakim Tinggi | Anggota |
| 8 | Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H. NIP. 195509081985121001 | Hakim Tinggi | Anggota |
| 9 | Itjah Minantika, SE.,SH.,MH NIP. 19770530 200502 2 001 | KaBag. Perencanaan dan Kepegawaian | Anggota |
| 10 | Sabrina Napitupulu, SE., MH NIP. 19661012 200604 2 001 | KaBag Umum dan Keuangan | Anggota |
| 11 | Jul Rizal, SH., MH NIP. 19610731 198303 1 004 | Panitera Muda Perdata | Anggota |
| 12 | Sutrisno Bardi SH., MH NIP. 19601010 198103 1 008 | Panitera Muda Pidana | Anggota |
| 13 | Watty Wiarti, SH., MH NIP. 19630327 198503 2 002 | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 14 | L.R Sophan Girsang, SH., MH NIP. 19620613 198912 1 003 | Panitera Muda Khusus Tipikor | Anggota |
| 15 | Amir Nurllah, SH NIP. 19810725 200112 1 003 | Kasub. Bag TU & RT | Anggota |
| 16 | Dwinanto, SE., SH NIP. 19810525 200904 1 001 | Kasub.Bag Keu & Pelaporan | Anggota |
| 17 | Destian Bimantoro, S.Kom NIP. 19851213 201101 1 007 | Kasub Bag. Kepegawaian dan TI | Anggota |
| 18 | Indah Pratiwie, S.E., M.M. NIP. 198806262011012025 | Kasub Bag. Renprog & Ang | Anggota |
| 19 | Budiarto, S.H., M.H. NIP. 19740112 199403 1 001 | Panitera Pengganti | Anggota |

KETUA,


 Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum
 NIP. 195604051982031005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/ 145 /KP.01.1/12/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2020-2024, PKT, RKT DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, PKT, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, PKT, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama), ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;


9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024, PKT, RKT DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, PKT, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.**
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.**
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

KETUA



Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 195604051982031005

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor : W10-U/145/KP.01.1/12/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024, PKT, RKT
DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

| No. | JABATAN | NAMA |
|-----|------------------------------|---|
| 1. | Pembina | Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum. NIP. 19560405 198203 1 005 |
| 2. | Penanggung Jawab | Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum NIP. 19611119 198512 1 001 |
| 3. | Pengarah Bidang Yudisial | H. Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H. NIP. 19641110 198702 1 001 |
| 4. | Pengarah Bidang Non Yudisial | Sudiyanto, S.H., M.H NIP. 19691130 199203 1 001 |
| 5. | Pelaksana | 1. Jul Rizal, SH.,MH NIP. 19610731 198303 1 004 2. Lorentius Raja Sophan Girsang, S.H., M.H NIP. 19620613 198912 1 003 3. Watty Wiarti, SH., MH NIP. 19630327 198503 2 002 4. Eddy Wiyono, SH. M.H NIP. 19650929 199003 1 001 5. Amir Nurlah, SH NIP. 19810725 200112 1 003 6. Dwinanto, SE.,SH NIP. 19810525 200904 1 001 7. Destian Bimantoro, S.Kom NIP. 19851213 201101 1 007 8. Indah Pratiwie, S.E., M.M. NIP. 19880626 201101 2 025 |
| 6. | Tim Pengolah Data | 1. Andral, S.H NIP. 19720309 199303 1 004 2. Gita Yunia Marsya, S.E NIP. 19950620 201903 2 010 3. Dwiningtyas Anggraeni, S.E NIP. 19910616 202012 2 009 4. Suci Wulan Asri, A.Md.Ak NIP. 19970806 202012 2 008 5. Meidina Silmi Putri, S.H NIP. 19980523 202203 2 012 6. Rina Asri Kurniawati, S.H 7. Agus Setiawan, S.S |
| 7. | Sekretariat | 1. Itjah Minantika, SE., SH., MH NIP. 19770530 200502 2 001 2. Sabrina Napitupulu, SE, MH NIP. 19661012 200604 2 001 3. Indah Pratiwie, S.E., M.M. NIP. 19880626 201101 2 025 4. Budiarto, S.H., M.H. NIP. 19740112 199403 1 001 |

KETUA

Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 19560405 1982031005